

**IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS  
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR PADA KANTOR  
SAMSAT TAKALAR**

**KARYA TULIS ILMIAH**

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D III-Perpajakan*



Oleh :

**ASHARI ZAINAL  
105751100120**

**PROGRAM STUDI DIII-PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2023**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Ketahuilah, sesungguhnya datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar. Bersama kesusahan pasti ada kemudahan. (HR. Abd bin Humaid di dalam Musnadnya (lihat durrah salafiyah hal 148.)”

(Penulis)

### **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya Sehingga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti Dan Terimakasih ku Kepada Orang Tuaku Bapak Zainal Dg. Nyonri

Ibu Hj. Hasbiah Dg. Ugi Yang Saya Cintai, Almamaterku

### **PESAN**

“Sabar adalah kunci kemenangan ”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0441) 860132 Makassar 90221*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Implementasi Pengendalian Internal Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Takalar

Nama Mahasiswa : Ashari Zainal

No. Stambuk/NIM : 105751100120

Program Studi : D-III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 14 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr.H.Andi Rustam. SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN.,CPA  
NIDN : 0909096703

Pembimbing II

  
5 April 2023

Dr. Andi Arifwansa Adiningrat, SE.,S.Pd.,M.Ak  
NIDN: 0916028901

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM: 651057

Ketua Program Studi D-III  
Perpajakan

Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak  
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221*

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Ashari Zainal  
No. Stambuk/NIM : 105751100120  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Dengan Judul : IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS  
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
PADA KANTOR SAMSAT TAKALAR

Dengan ini Menyatakan Bahwa

***Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya  
sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun***

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi  
apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 29 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Ashari Zainal**

NIM : 105751100120

Pembimbing I

**Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA**  
NIDN : 0909096703

Pembimbing II

**Dr. Andi Arifwanda Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak**  
NIDN : 0916028901



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**






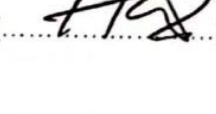

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir atas nama **Ashari Zainal NIM : 105751100120**,  
diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat  
Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-  
Y/61403/091004/2023 M, Tanggal 7 Shafar 1445 H / 23 Agustus 2023 M,  
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi  
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Shafar 1444 H  
27 Agustus 2023 M

**PANITIA UJIAN**

- |                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag<br>(Rektor Unismuh Makassar)            |   |
| 2. Ketua         | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 3. Sekretaris    | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC<br>(WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)  |  |
| 4. Penguji       | : 1. Dr. Andi Arifwangsa Adinigrat, SE., S.Pd., M.Ak                   |  |
|                  | 2. Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak                                       |  |
|                  | 3. Muhaimin, SE., M.AK., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA                   |  |
|                  | 4. Muhammad Khaedar Sahib, SE., M.Ak                                   |  |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M. Si**  
**NBM : 651 507**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh***

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Implementasi Pengendalian Internal Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Takalar”** Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama 3 tahun begitu terasa dalam sanubari, setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan, menyita waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat merampung karya tulis ilmiah ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Zainal Dg.Nyonri dan ibu

Hj.Hasbiah Gg.Ugi yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesai penulisan karya tulis ilmiah ini, dan kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, dan segenap Dosen beserta Staf Prodi DIII

Perpajakan.

4. Dr.H. Andi Rustam. SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN.,CPA selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Dr.Andi Arifwangsa Adiningrat, SE.,S.Pd.,M.Ak selaku Pembimbing II sekaligus Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Kantor Samsat Takalar yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Zainal Dg.Nyonri dan Mama Hj.Hasbia Dg.Ugi semoga Allah SWT melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. Sebagaimana mereka membesarkan dan mendidik penulis semenjak kecil yang atas asuhan, limpahan kasih sayang mereka penulis selalu memperoleh kekuatan material dan moral dalam merintis kerasnya hidup.



9. Terima Kasih kepada Sahabat sekaligus partner yang selalu mengulurkan tangan, mendukung, membantu dan menyemangati penulis Patahuddin dan Wahyudi Nazar Putra.
10. Terima Kasih kepada rekan-rekan Perpajakan 2020 D-III Perpajakan yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Terima Kasih kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb*

Makassar, 14 Agustus 2023

Ashari Zainal

## **ABSTRACT**

**ASHARI ZAINAL, 2023. Implementation of Internal Control Over Collection of Motorized Vehicle Taxes and Transfer Fees for Motorized Vehicles at the Takalar Samsat Office.** Scientific Writing (KTI). Faculty of Economics and Business Muhammadiyah Makassar University. Supervised by Advisor I Mr. H.Andi Rustam and Advisor II Mr Andi Arifwangsa Adiningrat.

*The purpose of this study is to find out the implementation of internal control over the collection of motorized vehicle tax (PKB) and motor vehicle transfer fees (BBNKB) at the Takalar Samsat Office. The data analysis technique used is a qualitative technique using the method of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to describe the internal control of the collection of motorized vehicle taxes and transfer fees for motorized vehicles.*

*The results of this study indicate that the existence of internal controls in the system of collecting motorized vehicle tax and motorized vehicle transfer fees can help regulate the mechanism for collecting vehicle tax and vehicle transfer fees and has been effective and successful in being carried out by the implementing party, namely the Takalar Samsat Office employees. The benefits of internal control are; improving infrastructure, increasing road safety, improving public services, reducing the general financing burden, and increasing tax awareness.*

**Keywords: Internal control, motorized vehicle tax, motorized vehicle title transfer fee**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. LandasanTeori.....	7
1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	7
2. Pajak Kendaraan Bermotor.....	7
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	11
4. Pengendalian Internal.....	13
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
B. Kerangka Konseptual.....	16
C. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	17
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	17
2. Sumber Informan.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisis Data.....	18
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>20</b>
A. Sejarah Singkat Kantor Samsat Takalar.....	20

B. Visi dan Misi Kantor Samsat Takalar .....	21
C. Struktur Organisasi.....	22
D. Hasil Penelitian.....	25
1. Jumlah Kendaraan.....	25
2. Penyederhanaan Pelayanan pada Layanan PKB dan BBN-KB .....	27
3. Mekanisme PKB dan BBNKB .....	28
4. Bentuk Pengendalian Internal .....	32
5. Target dan Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB .....	35
E. Pembahasan .....	38
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>48</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>60</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	16
Gambar 3.1 Jumlah Kendaraan yang Terdaftar pada Tahun 2020-2022.....	26
Gambar 3.2 Alur Pembayaran Samsat Stationer pada Kantor Samsat Takalar.....	28
Gambar 3.3 Alur Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	30
Gambar 3.4 Target dan Realisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB.....	37



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Kendaraan yang Terdaftar pada Tahun 2020-2022.....	25
Tabel 3.2 Waktu Pelayanan Samsat Takalar .....	31
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Penerimaan PKB.....	35
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Penerimaan BBN-KB.....	36
Tabel 3.5 Realisasi PKB dan BBN-KB.....	36



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti.....	49
Lampiran 2 Hasil Wawancara .....	50
Lampiran 3 Dokumentasi .....	52
Lampiran 4 Data Hasil Penelitian.....	53



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan ekonomi. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara yang bisa kita lihat yaitu (1) Sebagai Anggaran atau Penerimaan (*Budgeter*). Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari sektor pajak, masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri. Peran pajak sebagai *budgeter* bisa dikatakan sebagai fungsi yang utama. Dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana pada kas Negara sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. (2) Pajak berperan untuk Mengatur (*Regulator*) dipergunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan



kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dalam pemungutan pajak tersebut dilakukan pengendalian untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Termasuk dalam objek pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi. Beberapa penyebab yang mengakibatkan masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak kendaraan salah satunya yaitu kesadaran dalam membayar pajak kendaraannya

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian bea balik nama kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 14 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dalam arti bea balik nama kendaraan tergolong sebagai pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada

dalam pihak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak pendapatan daerah yang dapat memberikan sumbangsi yang tinggi terhadap daerah, yang seperti kita ketahui di era sekarang ini bahwa peningkatan kendaraan bermotor semakin meningkat. Tetapi pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayarkan pajak kendaraannya.

Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik nama kendaraan bermotor dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Sistem pemungutan PKB dan BBN KB ini dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang dikenal dengan SAMSAT. SAMSAT merupakan Kantor Bersama yang terdiri dari tiga unsur penting yaitu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Propinsi dan PT. Jasa Raharja. Pembayaran oleh Wajib Pajak PKB ini dilakukan di Kantor SAMSAT dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah, dimana pada umumnya berada di setiap daerah Kabupaten atau Kota. Sistem pengelolaan pemungutan PKB dan BBN KB ini sepenuhnya dilakukan di setiap Kantor SAMSAT dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah. Para aparat

atau petugas dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas administrasi dan operasional secara profesional dalam proses sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat bagi Wajib Pajak dan tetap dapat membuat laporan pendapatan pajak yang lebih baik dan akurat.

Untuk menunjang kelancaran proses pemungutan PKB dan BBN KB diperlukan sistem pengendalian internal, maka harus diimbangi pula dengan usaha-usaha yang lebih efisien dan efektif baik pengolahan data, sistem administrasi maupun kebijaksanaan dalam pemungutan PKB dan BBN KB.

★ Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor harus dilakukan dengan efektif agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan terhadap proses maupun dokumen-dokumen dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh para petugas, ketidak efisienan dalam beroperasi, kekurangan informasi, dan ketidak cermatan petugas dalam bekerja. Hal tersebut dapat menghambat proses pemungutan pajak. Sedangkan, jumlah para pembayar pajak atau wajib pajak tidaklah sedikit dan waktu yang disediakan juga terbatas. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang lebih baik agar proses pemungutan PKB dapat dilaksanakan dengan efektif.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dari wajib pajak harus dilaksanakan secara optimal tanpa mengabaikan peraturan perpajakan dan kebijakan yang berlaku. Untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diperlukan pengendalian internal yang baik dalam Kantor Bersama SAMSAT. Sistem pengendalian internal yang baik akan menjamin pelaksanaan pemungutan pajak. Dengan diterapkan sistem pengendalian internal yang baik dalam organisasi akan mengefektifkan organisasi sehingga terdapat penugasan fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas operasionalnya.

Dari hasil latar belakang saya di atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan merupakan salah satu penghasilan daerah yang potensial maka dari itu saya mengambil judul penelitian **“Implementasi Pengendalian Internal Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Takalar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumus masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana implementasi pengendalian internal terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Takalar?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui implementasi pengendalian internal atas sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Takalar.”

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan diatas, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat di jadikan masukan untuk menambah wawasan, pengetahuan mengenai Implementasi Pengendalian Internal Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Takalar.

#### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi untuk menambah pengetahuan dan informasi.

#### **3. Bagi Pihak Instansi**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan Impementasi Pengendalian Internal Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Takalar.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Suady (2013: 229) Pajak Daerah yaitu sumbangan yang harus diberikan dari perorangan maupun lembaga/instansi daerah tanpa upah langsung dan wajar dan bersifat keharusan menurut regulasi UU yang berlaku. yang dipergunakan untuk pembiayaan atas pelaksanaan pemerintah daerah dan pengembangan suatu daerah. Menurut penelitian Handayani dan Elva (2012) menyimpulkan Pajak Daerah mempengaruhi Belanja Daerah. Pajak Daerah didapati mempunyai pengaruh signifikan pada alokasi belanja daerah karena pajak merupakan penghasilan PAD yang terbesar, yang artinya pajak daerah yang semakin tinggi akan berpengaruh pada akan tingginya pula pengeluaran pemerintah kepada belanja daerah juga sebaliknya. Menurut penelitian Rosiana dan Handayani (2017) Pajak daerah (PD) mempunyai pengaruh yang positif juga signifikan pada Belanja Daerah. Yang mana Ketika dilakukan peningkatan pada pajak daerah, akan mengalami kenaikan pula pada belanja daerah.

## 2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di air.

Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut pasal 4 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang menjadi objek kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Sedangkan yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dan bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah.

- a) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya.
- b) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

- c) Untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Sebab ada beberapa pengecualian yakni:

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan Lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual; dan
- d) Kendaraan bermotor yang dikuasai negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.

1) Jenis kendaraan bermotor

- a) Mobil penumpang meliputi:

1) Sedan, sedan station dan sejenisnya.

2) Jeep dan sejenisnya.

- b) Station wagon, Minibus, Bemo, dan sejenisnya.

- c) Mobil bus meliputi: bus, microbus dan sejenisnya.



d) Mobil barang atau beban meliputi: pick-up, delivery van, double cabin, tangkaki dan sejenisnya. Kendaraan khusus (alat-alat berat dan alat-alat besar) meliputi: Mixer dan sebagainya.

e) Sepeda motor Sepeda motor meliputi:

- 1) Sepeda motor roda dua
- 2) Sepeda motor roda tiga
- 3) Scooter

Berdasarkan fungsinya dibedakan atas:

- a) Kendaraan tidak untuk umum
- b) Kendaraan untuk umum

2) Subjek pajak

- a. Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- b. Wajib pajak PKB ialah badan atau orang pribadi yang mempunyai dan menguasai kendaraan bermotor.

c. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:

- Untuk orang perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya.
- Untuk badan ialah pengurus atau kuasanya. Objek kendaraan bermotor

### 3) Objek kendaraan bermotor

a. Objek PKB ialah kepemilikan atau penguasaan kendaraan kendaraan bermotor

b. Objek pajak yang dikecualikan dari pajak adalah kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai oleh:

1) Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah Desa/kelurahan.

2) Kedutaan, konsulat, Perwakilan Negara Asing, perwakilan Lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

3) Pabrikasi untuk milik impor yang semata-mata tersedia

4) untuk dipamerkan atau untuk dijual.

### 3. Bea Balik Nama Kendaraan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berikutnya disingkat BBN- KB merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan ataupun penggantian hak kepemilikan kendaraan bermotor selaku akibat yang terjalin dari perjanjian dua pihak ataupun sepihak ataupun kondisi yang terjalin karena transaksi jual beli, peninggalan, ubah mengubah, hibah, ataupun pendapatan ke dalam badan usaha. Bagi undang- undang No 28

Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan ataupun kemampuan kendaraan bermotor Bagi Pasal 5 UU No 28 Tahun 2009, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor merupakan hasil perkalian dua faktor pokok, ialah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) serta bobot yang mencerminkan secara relative tingkatan kehancuran jalur serta/ ataupun pencemaran area akibat pemakaian kendaraan bermotor tersebut. Spesial buat kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalur umum tercantum alatalat berat serta alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

★ Pajak kendaraan bermotor dikenakan sepanjang dua belas bulan berturut-turut tiap tahunnya. Pemungutan PKB dicoba bersamaan dengan penerbitan STNKB dan perpanjangannya harus dicoba setiap tahunnya. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Undang-undang No 28 Tahun 2009, bea balik nama kendaraan bermotor (BBN- KB) merupakan pajak atas penyerahan hak kepunyaan kendaraan bermotor selaku akibat perjanjian kedua pihak ataupun perbuatan sepihak ataupun kondisi yang terjalin sebab jual beli, tukar - menukar, hibah, peninggalan, atau pendapatan ke dalam tubuh usaha.

Subjek pajak BBN-KB merupakan orang individu atau benda yang bisa menerima penyerahan kendaraan bermotor. Harus

pajak BBN-KB harus mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja semenjak dikala penyerahan. Penguasaan kendaraan melebihi dua belas bulan di luar perjanjian sewa beli bisa dikira sebagai penyerahan. Pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor dicoba pada saat registrasi.

1) Tarif pajak bea balik nama kendaraan

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor

- a) Untuk kendaraan pertama atau baru sebesar 12,5%
- b) Untuk beli bekas sebesar 1%

2) Objek dan subjek bea balik nama kendaraan bermotor

Dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang no 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa subjek bea balik nama kendaraan bermotor ialah orang pribadi maupun badan yang mampu menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dalam pasal 9 undang-undang No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa objek bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor.

#### 4. Pengendalian Internal

Menurut Hery (2013:159), pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi

perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Pengendalian internal ini cukup penting bagi perusahaan karena menyangkut data-data di dalam perusahaan karena setiap ada data yang masuk harus diverifikasi. Contohnya seperti rotasi jabatan, pengajuan cuti, laporan kerja dinas, dan lain-lain.

Berikut adalah beberapa tujuan dari pengendalian internal dalam sebuah perusahaan.

- a. Untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang telah berlaku.
- b. Untuk menjaga aset atau keuangan dalam sebuah perusahaan.
- c. Untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan.
- d. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat.
- e. Untuk mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya perusahaan.
- f. Untuk memastikan sudah dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan.
- g. Untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan

operasional perusahaan.

Pengendalian Internal sendiri terbagi beberapa macam, adapun 3 (tiga) jenis utama bentuk pengendalian internal yaitu:

- a. Kontrol internal detektif, diaktifkan setelah peristiwa yang merugikan terjadi, untuk menyelidiki insiden tersebut dan mencoba untuk menentukan bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Contoh: tinjauan log akses pengguna setelah pelanggaran data.
- b. Pengendalian internal preventif, diterapkan sebelum kejadian buruk tertentu terjadi, untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi sejak awal. Contoh: menggunakan otentikasi multi-faktor untuk membatasi akses ke data rahasia.
- c. Pengendalian internal korektif, diimplementasikan setelah pengendalian detektif selesai, untuk memperbaiki masalah dan (idealnya) mencegahnya terjadi lagi. Contoh: menerapkan kebijakan baru untuk segera menghancurkan data yang tidak perlu, untuk mencegah penyerang mencurinya.

## **5. Sistem Pemungutan Pajak**

Adapun sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut:

### *a. Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh Aparatur Negara (fiskus) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

*b. Self Assesment System*

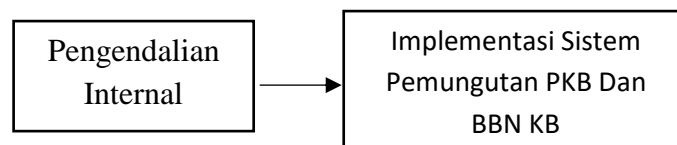
Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang dalam menghitung pajak terutang dilakukan Wajib Pajak dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*c. With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang dalam menghitung pajak terutang dilakukan tidak dengan fiskus maupun wajib pajak tapi memberi wewenang kepada pihak pihak ketiga sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

**B. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas tentang kantor Samsat Takalar mengenai penendalian internal atas implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).



**(Gambar 2.1 Kerangka Konseptual)**

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor SAMSAT Takalar Jln. Jendral Sudirman No.251 (poros takalar) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan Indonesia. Waktu penelitian telah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yang di mulai pada bulan April sampai Juli 2023.

### **2. Sumber Informan**

Informan yang akan bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pihak dari Kantor Samsat Kabupaten Takalar yaitu Bapak H. Asri Mulawarman yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mendukung para informan untuk memberikan tambahan informasi guna melengkapi temuan dan pembahasan penelitian mengenai Implementasi Pengendalian Intern atas Sistem Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Takalar.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun instrument dan Teknik pengumpulan yang dilakukan penelitian ada tiga yakni sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan mendatangi langsung dan melakukan wawancara dengan



informan yaitu pegawai yang mengetahui tentang pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari, mencatat, serta mempelajari sejumlah arsip atau dokumen resmi yang ada di tempat penelitian yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

c. Observasi

Observasi ialah proses mengumpulkan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian dan kondisi objek. Dalam penelitian ini, hal yang diamati adalah proses pencatatan terhadap wajib pajak, proses pemungutan pajak, serta proses aktivitas pengendalian internal yang dilakukan di tempat penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode yang seringkali digunakan dalam penelitian untuk mengolah data menjadi informasi yang akan mudah dipahami dan dapat bermanfaat dan dijadikan solusi permasalahan.

a. Reduksi Data

Teknik menganalisis data dengan cara memilih data mana saja yang relevan untuk memperkuat laporan atau hasil penelitian.

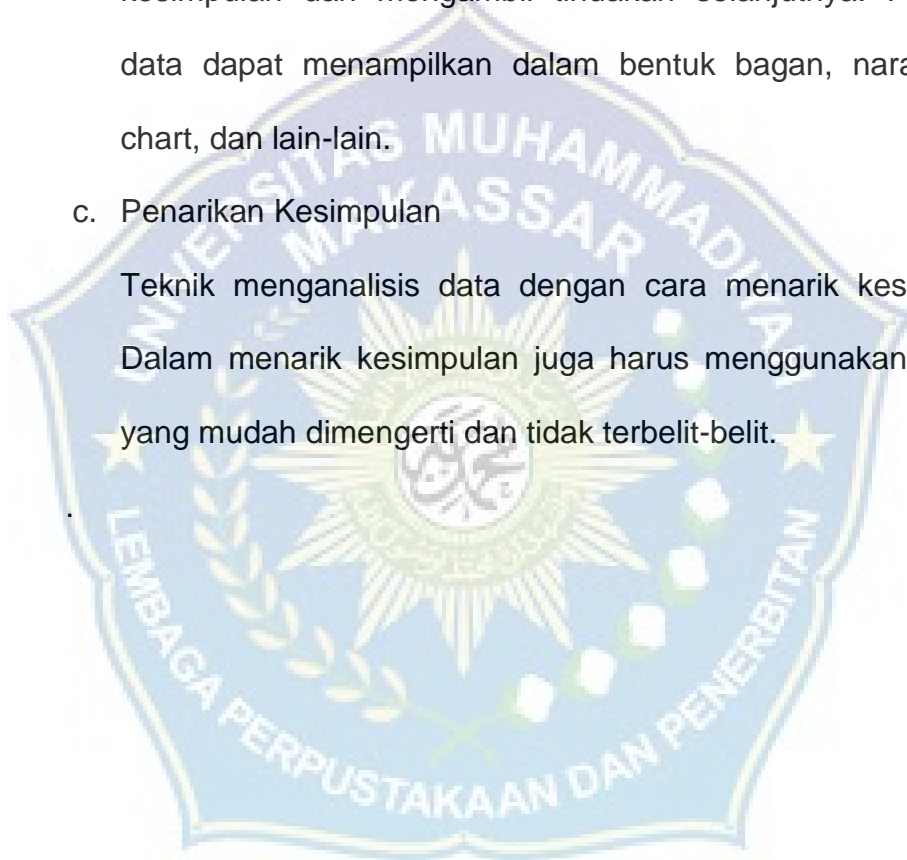
Reduksi data adalah proses pemilihan, data tersebut dapat dikategorikan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Teknik menganalisis data dengan cara mengumpulkan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Penyajian data dapat menampilkan dalam bentuk bagan, naratif, flow chart, dan lain-lain.

c. Penarikan Kesimpulan

Teknik menganalisis data dengan cara menarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Kantor Samsat Takalar**

Sebelum terbentuknya Samsat ada tiga instansi yang mewakili departemennya didalam memungut/mengelola administrasi surat-surat kendaraan bermotor. Pajak dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, pemberian nomor kendaraan bermotor dan pengeluaran STNK ditangani oleh Kepolisian, sedangkan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan oleh Instansi Asuransi Jasa Rahaja. Dari ketiga lembaga yang mengelola dalam satu objek secara terpisah, sehingga mengakibatkan tidak adanya keseragaman dalam sistem pemungutan, administrasi dan kerja sama dalam kebijaksanaan pungutan pajak dan kecelakaan lalu lintas jalan.

Pada waktu itu masa berlakunya Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) selama lima tahun, tanpa ada penelitian ulangan setiap tahunnya. Di dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka, pemerintah membentuk suatu Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu atap yang disingkat dengan SAMSAT disinilah awal mulanya terbentuknya SAMSAT. Samsat merupakan suatu jawaban atas adanya kebutuhan demi terciptanya suatu sistem pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang efektif dan efisien, dimana jumlah kendaraan bermotor telah meningkat setiap tahunnya sehingga perlu usaha peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor dan sebagai tindak lanjut untuk mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1968 jo. IT Nomor 5 Tahun 1969 tentang penyerahan pungutan Pajak Bea Balik Nama kendaraan bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa otonomi daerah harus dilaksanakan secara nyata dan tanggung jawab, dimana pemerintah daerah berkewajiban mengurus rumah tangganya dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya yang ada, didalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga perlu diciptakan suatu sistem yang dapat menjamin pengelolaan keuangan yang bersumber dari Pajak kendaraan bermotor yang dikenal dengan nama Samsat.

## **B. Visi dan Misi Samsat Takalar**

### **❖ Visi**

“Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Pengurusan Administrasi Dan Regident Kendaraan Bermotor Melalui Keterpaduan Pelayanan Polri, Pemda, dan Jasa Raharja Pada SAMSAT”

### **❖ Misi**

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung

tinggi etika profesi.

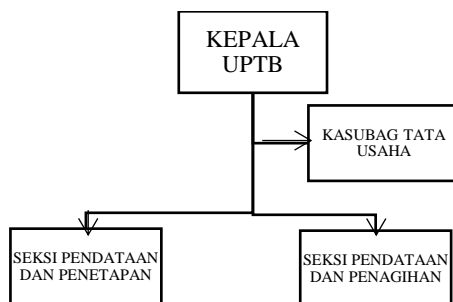
2. Melaksanakan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat.
3. Mewujudkan aparat pelaksanaan SAMSAT yang bersih, jujur dan cakap bertanggungjawab serta professional.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
5. Penataan arsip kendaraan yang tertip untuk memudahkan identifikasi dan keamanan dokumen.

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)  
Jln. Jendral Sudirman No.251 (Poros Takalar) Kabupaten Takalar,  
Sulawesi Selatan Indonesia.

### **C. Struktur Organisasi**

Pada dasarnya setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi yang menjadi gambaran untuk masing-masing tugas dan kedudukan dalam suatu organisasi. dengan adanya struktur organisasi tersebut maka akan terlihat dengan jelas dan lebih tertata tugas dan wewenang dari setiap bagiannya. selain itu memudahkan karyawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. berikut ini adalah struktur organisasi Samsat Keliling.

### Struktur Organisasi UPTB Kabupaten Takalar



Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPT pendapatan wilayah Takalar

#### 1. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Samsat Takalar

Kantor bersama samsat merupakan tempat bernaungnya tiga instansi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan melihat kembali aktivitas Samsat, maka sesungguhnya ada dua tujuan pokok yang menjadi fungsi dari Kantor bersama Samsat, yaitu:

- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor.
- b) Meningkatkan penerimaan daerah dan negara dari sektor perpajakan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Uraian tugas jabatan struktural pada Kantor Samsat Takalar:

##### 1) Kepala UPTD

Kepala Unit Pelaksana Tehnik Dinas Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam

bidang pemungutan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## 2) Kasubag Tata Usaha

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang ketatausahaan, menghimpun dan mengirimkan semua laporan secara berkala seluruh kegiatan unit pajak kendaraan bermotor dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

## 3) Seksi Pendataan dan Penetapan

Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan Objek dan Subjek PKB, serta menyusun dan menyajikan data kendaraan yang akan berakhir masa pajaknya.

## 4) Seksi Penagihan Seksi Penagihan

Dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang penagihan melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pelayanan Pajak Daerah, membuat pembukuan data tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan melakukan penagihan pasif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB).

## D. Hasil Penelitian

### 1. Jumlah Kendaraan

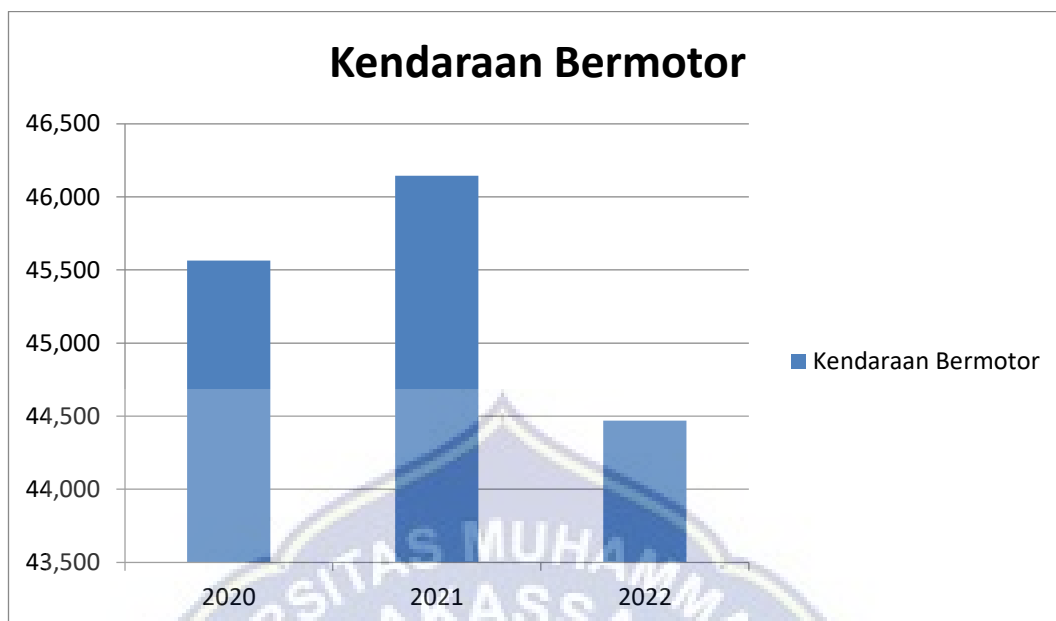
Kabupaten Takalar adalah salah satu daerah jumlah kendaraan bermotor yang tinggi, Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar sebanyak 146.179 unit. Penggunaan transportasi kendaraan bermotor ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dalam sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jumlah kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1 Jumlah kendaraan yang terdaftar pada tahun 2020-2022**

NO	Tahun	Kendaraan Bermotor (unit)
1.	2020	45.564
2.	2021	46.145
3.	2022	44.470
Jumlah		146.179

(sumber : Kantor SAMSAT Takalar, 2023)





**Gambar 3.1**

### **Jumlah kendaraan yang terdaftar pada tahun 2020-2022**

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun 2020 sejumlah 45.546 unit, tahun 2021 mengalami peningkatan sejumlah 46.145 unit, dan tahun 2022 kembali mengalami penurunan sejumlah 44.470 unit.

Kantor samsat Takalar ini merupakan lembaga penghimpunan pajak kendaraan bermotor. Dalam upaya ataupun usaha dalam meningkatkan pelayanan kantor samsat memberikan pelayanan yang memadai dan nyaman sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Asri Mulawarman (Tanggal 15 Juni 2023).

“Di kantor samsat Takalar ini bagi yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor, kami telah memberikan beberapa

sarana pelayanan yaitu seperti kantin, cetak plat, parkir, ruang tunggu yang ber-AC, dan ruang merokok.”

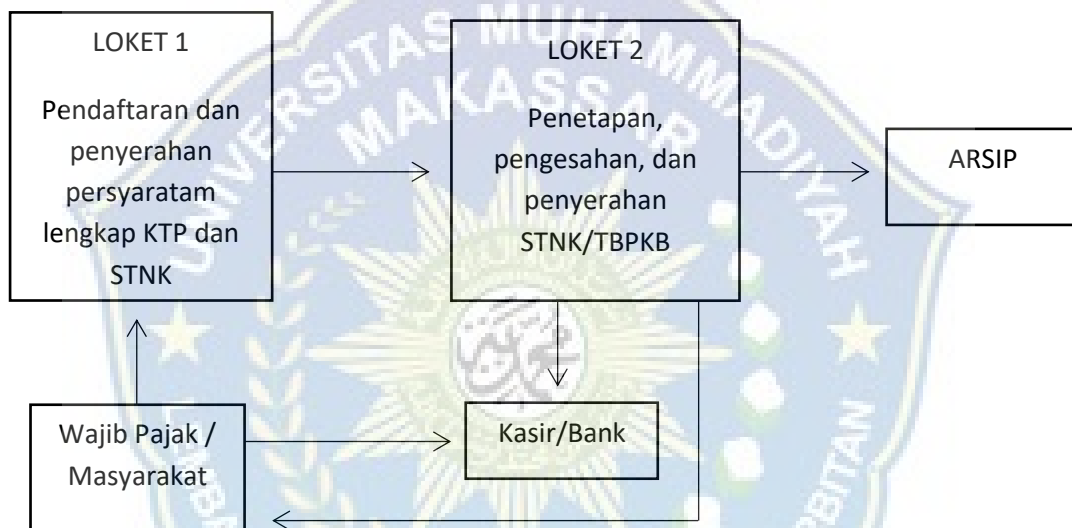
## **2. Penyederhanaan Layanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

a) Tinjauan penyederhanaan persyaratan pelayanan pada pelaksanaan pelayanan kantor samsat Takalar telah menetapkan administrative yang diperlukan ketika melakukan sesuatu pelayanan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Adapun persyaratan dalam pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor samsat Takalar adalah sebagai berikut :

- 1) Foto Copy KTP dan STNK
  - 2) STNK asli
  - 3) Map Pendaftaran
- b) Penyederhanaan dalam pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada kantor samsat Takalar
- 1) KTP asli dan fotocopy pemilik baru
  - 2) BPKB asli dan fotocopy
  - 3) STNK asli dan fotocopy
  - 4) Bukti jual beli kendaraan
  - 5) Bukti cek fisik
- c) Prosedur Alur Pembayaran Stationer pada kantor samsat Takalar

### 3. Mekanisme Pemugutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Prosedur alur pembayaran merupakan langkah yang harus dilalui dalam melakukan pembayaran pajak, tidak terkecuali pada alur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor samsat Takalar. Adapun alur pembayaran pajak yang harus diikuti oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor sebagai berikut :



**Gambar 3.2**

#### Alur Pembayaran Samsat Stationer pada Kantor Samsat Takalar

Alur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap satu tahun sekali bagi Wajib Pajak kendaraan bermotor, sebagai berikut :

##### 1) Loker 1

Pada loket pertama Wajib Pajak menyerahkan beberapa beberapa persyaratan berkas seperti fotocopy KTP, STNK, dan notis pajak sebelumnya pada loket 1

sebagai persyaratan dalam pendaftaran.

2) Loker 2

Pada loket 2 ini ada dua hal yang dilakukan oleh pegawai yaitu penetapan dan pengesahan notis Pajak dan STNK. Wajib Pajak memberikan notis pajak ataupun STNK kepada pegawai yang berada di loket 2 untuk melakukan penetapan dan mengeluarkan resi pembayaran.

3) Kasir/Bank

Pada tahap ini Wajib Pajak memperlihatkan resi yang telah diberikan ke loket kasir/bank dan kemudian pihak loket kasir/bank memberi informan jumlah pajak kendaraan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor dan Wajib Pajak menyelesaikan pembayaran pajak.

4) Loker 2

Setelah menyelesaikan pembayaran pada loket kasir/bank, Wajib Pajak kembali ke loket 2 untuk memperlihatkan bukti tanda pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada petugas loket 2 untuk di cetakkan notis pajak baru maupun STNK baru. Setelah dicetak akan dilakukan pengesahan notis pajak maupun STNK baru dari tiga instansi yaitu Kepolisian, UPTD, dan Jasa Raharja.

### 5) Arsip

Setelah melakukan pencetakan notis Pajak maka notis ini terbagi menjadi lima notis pajak dengan warna yang berbeda dengan tujuan untuk memudahkan pengarsipan. Berikut merupakan warna dan tujuan instansi notis pajak :

- a. Notis pajak warna coklat keemasan untuk pemilik kendaraan bermotor.
- b. Notis pajak warna pink untuk arsip UPTD.
- c. Notis pajak warna biru untuk arsip pusat.
- d. Notis pajak warna kuning untuk pihak kepolisian.
- e. Notis pajak warna hijau untuk arsip Jasa Raharja.

#### a. Alur Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Adapun alur pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan



**Gambar 3.3 Alur Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Adapun alur pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dengan persyaratan lengkap
2. Melakukan cek fisik kendaraan bermotor
3. Mengisi formulir yang disediakan
4. Ke loket pendaftaran untuk mendaftar
5. Ke kasi pajak
6. Kemudian bayar ke kasir
7. Terakhir penyerahan STNK.

#### **b. Waktu Pelayanan Stationer Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Waktu pelayanan merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak pengguna layanan stationer pada kantor samsat Takalar.

**Tabel 3.2 Waktu Pelayanan Samsat Takalar**

<b>Jadwal Pelayanan Samsat Stationer</b>	<b>Waktu Pelayanan</b>
Senin - Jumat	08.00 – 16.00
Istirahat	12.00 – 13.00
Sabtu - Minggu	Libur

(Sumber: Kantor Samsat Takalar, 2023)

#### 4. Bentuk Pengendalian Internal

Proses yang dirancang untuk memastikan bahwa operasi organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, serta untuk melindungi aset organisasi dari penyalahgunaan dan kehilangan. Dalam konteks layanan pemungutan pajak, pengendalian internal sangat penting untuk memastikan integritas dan keandalan proses pemungutan pajak. Berikut adalah beberapa bentuk pengendalian internal yang dapat diterapkan dalam layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Takalar.

SAMSAT Kabupaten Takalar memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait pemungutan pajak. Hal ini mencakup prosedur untuk mendaftarkan wajib pajak, menghitung dan mengumpulkan pajak, serta pelaporan dan pembayaran pajak kepada otoritas yang berwenang. Kebijakan dan prosedur ini disusun dengan baik, dipahami oleh semua pihak terkait, dan secara teratur diperbarui sesuai dengan perubahan peraturan perpajakan.

Pada pemungutan pajak, tugas-tugas yang terkait dengan pendaftaran, perhitungan, pengumpulan, pelaporan, dan pembayaran pajak harus dipisahkan di antara beberapa individu

atau departemen yang berbeda. sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Asri Mulawarman (Tanggal 15 Juni 2023).

”Orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak tidak boleh memiliki akses ke dana yang terkumpul dan tidak boleh memiliki wewenang untuk melaporkan atau membayar pajak tersebut”

Pada Samsat Takalar dilakukan pengendalian internal atas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang juga memberikan manfaat yang penting bagi masyarakat, beberapa manfaat yang diberikan menurut bapak H. Asri Mulawarman dalam wawancara (Tanggal 15 Juni 2023) di antaranya:

#### 1. Peningkatan Infrastruktur

Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan transportasi umum. Dengan adanya pengendalian internal yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa pendapatan pajak digunakan secara efektif untuk meningkatkan infrastruktur transportasi, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam hal aksesibilitas dan mobilitas yang lebih baik.

#### 2. Peningkatan Keamanan Jalan

Melalui pengendalian internal pajak kendaraan bermotor, pemerintah dapat memperketat pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi. Hal ini mencakup pemeriksaan



kelengkapan administrasi dan kondisi teknis kendaraan. Dengan demikian, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dapat diidentifikasi dan ditindak, sehingga meningkatkan keselamatan jalan bagi masyarakat.

### 3. Peningkatan Layanan Publik

Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor juga dapat digunakan untuk membiayai layanan 34ariff, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kebersihan. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa pendapatan pajak dialokasikan secara tepat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

### 4. Mengurangi Beban Pembiayaan Umum

Dengan adanya pengendalian internal pajak kendaraan bermotor yang baik, pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan pajak yang diperoleh. Hal ini dapat mengurangi beban pembiayaan umum, seperti pajak atau tarif lain yang mungkin diterapkan untuk menggantikan pendapatan pajak yang tidak terkumpul. Dengan demikian, pengendalian internal pajak kendaraan bermotor membantu masyarakat dalam mengurangi beban finansial yang mungkin mereka tanggung.

### 5. Merangsang Kesadaran Pajak: Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah serius dalam mengawasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membentuk budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di masyarakat. Adapun beberapa manfaat dari pengendalian internal menurut bapak H. Asri Mulawarman (15 Juni 2023) :

” Secara keseluruhan, pengendalian internal pajak kendaraan bermotor memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan infrastruktur, peningkatan keamanan jalan, peningkatan layanan publik, pengurangan beban pembiayaan umum, dan peningkatan kesadaran pajak. Manfaat-manfaat ini memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.”

#### 5. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar tahun 2020-2021 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Target dan Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Tahun	(A) Target	(B) Realisasi Penerimaan PKB	% (B/A)
2020	Rp.30.800.075.000	Rp.26.574.205.897	86,27%
2021	Rp.29.843.065.000	Rp.25.017.633.444	83,83%
2022	Rp.27.190.344.000	Rp.24.978.978.815	91,86%
<b>Jumlah</b>	Rp.87.824.484.000	Rp.76.570.818.156	87,18%
<b>Rata-Rata</b>	Rp.29.277.828.000	Rp. 25.523.606.052	87,32%

Sumber : Data diolah (2023)

Adapun target dan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Tahun	(A) Target	(B) Realisasi Penerimaan BBNKB	% (B/A)
2020	Rp.20.000.065.000	Rp.16.817.078.500	84,08%
2021	Rp.22.626.229.000	Rp.20.757.430.000	91,74%
2022	Rp.21.479.478.000	Rp.20.494.683.000	95,41%
<b>Jumlah</b>	Rp.64.105.772.000	Rp.58.069.191.500	90,58%
<b>Rata-Rata</b>	Rp.21.368.590.666	Rp.19.356.397.166	90,41%

Sumber : Data diolah (2023)

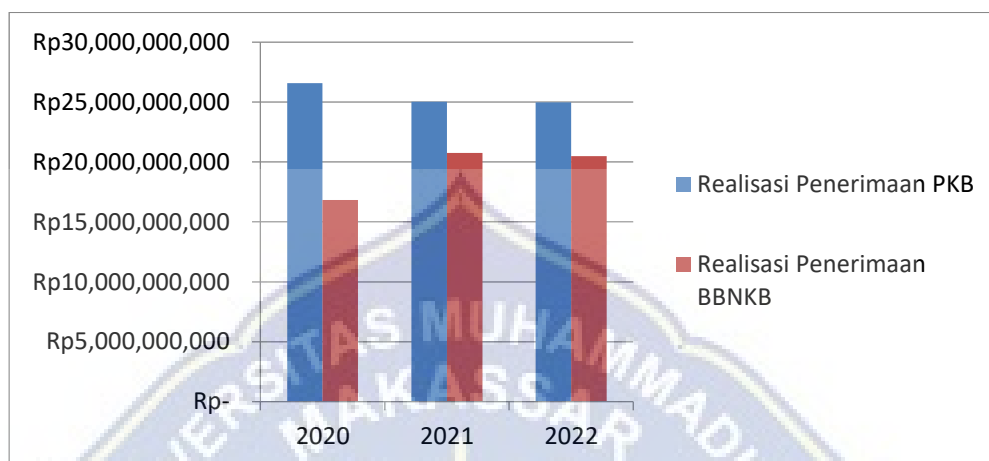
**Tabel 3.5 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)**

Tahun	Realisasi Penerimaan PKB	Realisasi Penerimaan BBNKB	Total Realisasi	Ket.
2020	Rp.26.574.205.897	Rp.16.817.078.500	Rp.43.391.284.397	Efektif
2021	Rp.25.017.633.444	Rp.20.757.430.000	Rp.45.775.063.444	Efektif
2022	Rp.24.978.978.815	Rp.20.494.683.000	Rp.45.473.661.815	Efektif
<b>Jumlah</b>	Rp.76.570.818.156	Rp.58.069.191.500	Rp.134.640.009.656	Efektif
<b>Rata-Rata</b>	Rp.25.523.606.052	Rp.19.356.397.166	Rp.44.880.003.218	Efektif

Sumber : Data diolah (2023)

Tabel 3.5 menunjukkan realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB. Realisasi PKB pada tahun 2020 memperoleh sebesar Rp.26.574.205.897 sedangkan BBN-KB sebesar Rp.16.817.078.500 keterangan efektif. Tahun 2021 realisasi PKB menunjukkan Rp.25.017.633.444 sedangkan BBN-KB sebesar

Rp.20.757.430.000 dengan keterangan efektif. Kemudian pada tahun 2022 realisasi pada PKB sebesar Rp. 76.570.818.156 dan BBN-KB sebesar Rp.58.069.191.500 dengan keterangan efektif.



Sumber: Kantor Samsat Takalar, 2023

### **Gambar 3.3 Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Berdasarkan data penerimaan Kantor Samsat Takalar dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat disimpulkan bahwa penerimaan di tahun 2020 sejumlah Rp. 26.574.205.897 atau 86,27% dari target, dan di tahun 2021 mengalami penurunan dari segi realisasi sebesar Rp. 25.017.633.444 atau 83,83% dari target. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan ke Rp. 24.978.978.815 atau 91,86% dari keseluruhan realisasi sebesar Rp.76.570.818.156 dari target Rp.87.824.484.000 atau 87,18%.

Penerimaan bea balik nama kendaraan pada kantor samsat Takalar dapat disimpulkan bahwa penerimaan di tahun 2020 sejumlah Rp. 16.817.078.500 atau 84,08% dari target dan di tahun

2021 mengalami peningkatan dari segi realisasi sebesar Rp. 20.757.430.000 atau 91,74% dari target. Dapat kita lihat perbandingan antara tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan ke Rp. 20.494.683.000 atau 95,41% dari target.

#### **E. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor SAMSAT Takalar pada tahun 2020 sejumlah 45.564 unit dan tahun 2021 mengalami peningkatan sejumlah 46.145, pada tahun 2022 mengalami penurunan ke 44.470 unit, jumlah pada kendaraan bermotor menurun ini dikarenakan perekonomian masyarakat masih dalam proses pemulihan dari covid-19. Bea balik nama kendaraan pada tahun 2020 berjumlah 45.564 pada tahun 2021 berjumlah 46.145, pada tahun tersebut mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 sejumlah 44.470 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan yang disebabkan oleh proses pemulihan wabah Covid 19. Berdasarkan dari data penerimaan Kantor Samsat Takalar dapat dilihat bahwa penerimaan di tahun 2020 sebesar Rp. 26.574.205.897 dan ditahun 2021 sebesar Rp. 25.017.633.444 mengalami penurunan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan

realisasi sebesar Rp. 24.978.978.815 dalam penerimaan Kantor Samsat Takalar yang diakibatkan karena proses pemulihan perekonomian dari covid 19.

Penerimaan bea balik nama kendaraan pada kantor samsat Takalar dapat di simpulkan bahwa penerimaan di tahun 2020 sejumlah Rp. 16.817.078.500 dan di tahun 2021 mengalami peningkatan dari segi realisasi sebesar Rp. 20.757.430.000 dan dapat kita lihat perbandingan anantara tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan yang diakibatkan karena banyaknya masyarakat yang membeli kendaraan baru. Pada tahun 2022 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 20.494.683.000 dilihat dari tahun 2021 mengalami penurunan.

Adapun jumlah realisasi pajak kendaraan bermotor selama tiga tahun sebesar Rp. 76.570.818.156, jumlah realisasi bea balik nama kendaraan bermotor sebesar selama 3 tahun sebesar Rp. 58.069191.500, dan jumlah total realisasi keseluruhan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama tiga tahun sebesar Rp. 134.640.009.656.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pungutan pajak tahunan yang dilakukan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan pemungutannya dilakukan dengan sistem official assessment dimana aparaturnya yang menentukan jumlahnya. Seperti

diketahui, segala kegiatan yang dilakukan di kantor samsat didasarkan pada sistem manajemen yang telah ditetapkan. Implementasi atas sistem pemungutan pajak diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan - kebijakan yang tertuang dalam peraturan atau pedoman sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

Aktivitas pengendalian kegiatan memastikan bahwa praktik kerja karyawan telah sesuai dengan kebijakan agar dapat menangani risiko dari tujuan pengendalian internal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan dilihat dari kegiatan pengendalian pada semua bagian terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adanya pemisahan fungsi dalam setiap divisi menjadi salah satu indikator pengendalian telah dilakukan dengan baik. Selain itu adanya pemisahan otorisasi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta adanya pengawas dalam setiap divisi-divisi terkait menjadi implikasi kegiatan pengendalian telah diterapkan sesuai dengan prosedur.

Pada kebijakan pada kantor samsat Takalar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan internal dan keteraturan pelaksanaan, lalu dengan adanya struktur organisasi pada kantor yang berisikan tanggung jawab para karyawan dalam bekerja. Berdasarkan

pengendalian internal atas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang telah diteliti, diketahui bahwa bagian-bagian yang terlibat diantaranya yaitu: (a) Bagian Pendaftaran yang bertugas dalam proses kerja entry data yang dilakukan oleh petugas pendaftaran saat memberikan pelayanan pada wajib pajak. (b) Bagian Penetapan yang bertugas dalam melaksanakan penetapan besarnya PKB dan BBNKB sesuai jenis, tahun dan tipe kendaraan berdasar nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku. (c) Bagian Pembayaran yang bertugas dalam menerima, menghimpun, dan menyetor pembayaran PKB dan BBN-KB dari wajib pajak. Dalam pelayanan pemungutan pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh kantor samsat Takalar. Seperti yang telah dikatakan oleh kepala sub bagian penetapan dan penerimaan:

Adapun kendala yang telah dihadapi yaitu dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sering terjadi kekurangan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pengendalian internal dengan baik. Kurangnya personel yang terlatih dan berpengalaman dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses pemungutan pajak dan bea balik nama. Peraturan terkait pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama dapat berubah secara periodik. Jika sistem



pengendalian internal tidak diperbarui secara tepat waktu, dapat terjadi kesenjangan antara kebijakan dan praktik yang dijalankan. Ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengendalian internal membutuhkan data dan informasi yang akurat dan relevan. Jika sistem pencatatan dan pelaporan tidak memadai, atau data yang diperlukan tidak tersedia, maka pengendalian internal menjadi rentan terhadap kesalahan dan penyalahgunaan.

Adapun tujuan dari pengendalian internal atas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu; (a) Untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang telah berlaku. (b) Untuk menjaga aset atau keuangan dalam sebuah perusahaan. (c) Untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan. (d) Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat. (e) Untuk mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya perusahaan. (f) Untuk memastikan sudah dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. (g) Untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan.

Pengendalian internal atas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sangat membantu dalam mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai maupun masyarakat dalam pemungutan serta

pembayaran pajak itu sendiri. Organisasi memiliki jumlah personel yang cukup dan berkualitas untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dan bea balik nama dengan baik. Mereka telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. SAMSAT Kabupaten Takalar Senantiasa up-to-date dengan peraturan yang berlaku terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hana Soraya Harahap (2019) dalam meneliti Implementasi Pengendalian Internal atas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Awalia Nurul Fadila (2022) dalam meneliti Implementasi Pengendalian Internal Atas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bulukumba. Kemudian Arinata (2014) dalam meneliti Pengaturan Penegelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian implementasi pengendalian internal atas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dalam pemungutan pajak kendaraan ini dapat membantu dalam mengatur mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta sudah baik dan berhasil dilakukan oleh pihak pelaksana; yaitu karyawan di bagian pendaftaran, penetapan, dan pembayaran dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Beberapa manfaat yang diberikan dalam pengendalian internal ini berupa peningkatan infrastruktur, peningkatan keamanan jalan, peningkatan layanan publik, pengurangan beban pembiayaan umum, dan peningkatan kesadaran pajak.

#### **B. Saran**

Pihak kantor samsat agar mempertahankan pelayanan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta mempertahankan pengendalian internalnya dalam pemungutan pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku dan Artikel

- Ardianti. (2014). *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor Oleh Binas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (studi kasus di kantor dinas pendapatan daerah provinsi jawa timur unit pelaksana teknis dinas (uptd) malang kota)*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(1): 1-17
- Arinata, D. N. (2014). *Pengaturan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal NESTOR Magister Hukum.
- Diago, M. (2015). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Periode 2009-2013 (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara)*5(2)
- Djajadiningrat, S.I. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Andi: Yogyakarta.
- Fadila, A. N. (2022) *Implementasi Pengendalian Internal Atas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bulukumba*. Karya Tulis Ilmiah Digilibadmin.unismuh.ac.id.
- Harahap, H. S. (2019). *Implementasi Pengendalian Internal Atas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)*.
- Hartati, I. P. (2020). *Analisis Sistem Bea Balik Nama Mutasi Keluar Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Utara (Doctoral Dissertation Universitas Airlangga)*.
- Hery. (2013). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT.Grasindo
- Elva. (2012) *Pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah* 1(1)1-12
- Handayani, Rosiana (2017) *Pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah* (4) 22-24

Karina, N., (2016). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1): 715-722.

Mardiasmo. (2012). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.

Muslim,L.F. (2017). *Implementasi Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda*. Jurnal Administrative Reform, 43-55

Ponto, A. J., & Avandia,D. (2015). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 3(3)

Siahaan, Marihot P. (2014). *Pajak Dearah Dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers: Jakarta. 2(1)

Sofyan, M. (2016). *Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor*. Jurnal Eksekutif. 13(1): 59-77.

### **Sumber Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 4 *tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Yang Menjadi Objek Kendaraan Bermotor*.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 5 *Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor*

### **Sumber Internet**

<https://www.merdeka.com/jabar/tujuan-pengendalian-internal-pengertian-beserta-komponennya-klm.html> (di akses pada tanggal 17 Juli 2023 05.00)

<https://media.neliti.com/media/publications/98445-ID-implementasi-kebijakanprogram-pembangun.pdf/> (di akses pada tanggal 5 Januari 2023 14.00)

<https://www.dipendajatim.go.id/wp-content/uploads/2015/07/struktur-organisasi-UPT.jpg/> (di akses pada tanggal 18 Januari 2023 20.00)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/60tahun2008pp.htm> ( di akses pada tanggal 13 April 2023 23.48 )





## LAMPIRAN 1

### SURAT PENELITIAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>14208/S.01/PTSP/2023</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Takalar
Perihal	: <b><u>Izin penelitian</u></b>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1078/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>ASHARI ZAINAL</b>
Nomor Pokok	: 105751100120
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TAKALAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **31 Maret s/d 31 Mei 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 28 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



## LAMPIRAN 2

## DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

NO	Kantor Samsat Gowa	Pertanyaan	Wawancara
1.	Bapak H. Asri Mulawarman	Siapa pelaksana pengendalian internal di kantor samsat Takalar?	Kalau sisi pelayanan saya sebagai penanggung jawabnya.
2.		Apakah pernah dilakukan pemeriksaan dikantor samsat?	Sering, kita dari kantor pusat dalam per 3 bulan mereka turun untuk mengontrol dalam pengendalian apa saja yang telah dilaksanakan di UPT masing-masing
3.		Siapa yang menjadi pengawas pengendalian internal?	Yang menjadi pengawas pengendalian internal disini yaitu Polri, Jasaraharja, dan dari Bapenda.
4.		Kendala apa yang selama ini dialami dalam memberi pelayanan kepada masyarakat?	Selama saya pribadi ada disini selama krang lebih 6 tahun, tidak ada kendala karena kalaupun ada kendala masyarakat mengutarakan ke ruang pengajuan.

5.		Sejal kapan kantor ini memiliki pengendalian internak?	Pengendalian internal ini sudah ada sejak samsat itu berdiri.
6.		Menurut bapak apa pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sudah sesuai dengan prosedurnya?	Merut saya sudah, karena disini kita mempunyai struktur dalam artian wajib pajak langsung diarahkan oleh petugas untuk mendaftar setelah itu diarahkan ke penetapan, penetapan ke kasir, sudah sesuai prosedur.

**LAMPIRAN 3**  
**DOKUMENTASI**



**(Dokumentasi saat wawancara)**



REALISASI PENERIMAAN PADA KANTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR													
BULAN : DESEMBER 2021													
CODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	LOKAL	LINK	ESANSIAT	JUMLAH	S/D	%	JUMLAH UNIT			
		OMONG TERHADAP	BULAN LAU	LAU			BULN INI	BULN INI	BUN LAU	BUN INI	S/D BUN INI		
4.1.01.01	PAJAK KENDARAAN BERNOTOR	29.843.065.000	28.017.633.444	2.443.783.350	993.008.664	-	3.436.792.014	28.454.425.458	95,38%	39.648	5.072	44.717	
4.1.01.01.01	PKB Mobil Penumpang Sedan	248.021.000	202.094.513	18.306.452	39.255.857	-	57.562.309	259.656.252	104,69%	96	23	119	
4.1.01.01.01.0001	PKB Mobil Penumpang Sedan Pribadi	246.287.000	200.797.883	18.306.452	39.255.857	-	57.562.309	258.360.192	104,90%	95	23	118	
4.1.01.01.01.0002	PKB Mobil Penumpang Sedan Umum	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
4.1.01.01.01.0004	PKB Mobil Penumpang Pemerintah Daerah	1.734.000	1.296.630	-	-	-	1.296.630	-	54,78%	1	-	1	
4.1.01.01.02	PKB Mobil Penumpang Jeep	1.375.330.000	1.127.604.471	73.892.306	43.821.619	-	117.713.925	1.245.318.396	90,85%	296	30	326	
4.1.01.01.02.0001	PKB Mobil Penumpang Jeep Pribadi	1.343.659.000	1.103.921.721	73.892.306	43.821.619	-	117.713.925	1.221.635.646	90,92%	287	30	317	
4.1.01.01.02.0002	PKB Mobil Penumpang Jeep Umum	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
4.1.01.01.02.0003	PKB Mobil Penumpang Jeep Pemerintah Pusat	6.536.000	4.887.750	-	-	-	4.887.750	-	74,78%	1	-	1	
4.1.01.01.02.0004	PKB Mobil Penumpang Jeep Pemerintah Daerah	25.155.000	18.795.000	-	-	-	18.795.000	-	74,78%	1	-	1	
4.1.01.01.03	PKB Mobil Penumpang Miibus	13.440.119.000	11.347.760.907	1.109.991.889	561.852.121	-	1.671.844.010	13.019.604.917	96,87%	5.166	780	5.946	
4.1.01.01.03.0001	PKB Mobil Penumpang Miibus Pribadi	13.343.063.000	11.266.562.174	1.095.230.958	561.852.121	-	1.657.083.109	12.923.645.283	96,86%	5.094	761	5.855	
4.1.01.01.03.0002	PKB Mobil Penumpang Miibus Umum	22.017.000	16.464.000	829.238	-	-	829.238	17.293.238	78,54%	14	2	16	
4.1.01.01.03.0003	PKB Mobil Penumpang Miibus Pemerintah Pusat	73.116.000	4.182.150	588.656	-	-	588.656	4.770.806	6,55%	3	1	4	
4.1.01.01.03.0004	PKB Mobil Penumpang Miibus Pemerintah Daerah	7.901.000	60.552.583	13.348.007	-	-	13.348.007	79.595.590	99,97%	53	16	70	
4.1.01.01.04	PKB Mobil Penumpang Microbus	24.914.000	18.629.790	5.392.608	5.392.608	-	10.829.699	29.159.489	118,24%	8	5	13	
4.1.01.01.04.0001	PKB Mobil Penumpang Microbus Pribadi	19.063.000	14.254.530	-	5.392.608	-	5.392.608	19.647.138	103,06%	4	1	5	
4.1.01.01.04.0002	PKB Mobil Penumpang Microbus Pempus	-	-	906.633	-	-	906.633	906.633	#DIV/0!	-	1	1	
4.1.01.01.04.0004	PKB Mobil Penumpang Microbus Pemerintah Daerah	5.851.000	4.375.260	4.530.458	-	-	4.530.458	8.905.718	152,21%	4	3	7	
4.1.01.01.05	PKB Mobil Penumpang Bus Bus	750.000	561.000	-	-	-	-	561.000	0,00%	1	-	1	
4.1.01.01.05.0001	PKB Mobil Penumpang Bus Bus Pribadi	-	561.000	-	-	-	-	561.000	#DIV/0!	-	-	-	
4.1.01.01.05.0002	PKB Mobil Penumpang Bus Bus Umum	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
4.1.01.01.05.0004	PKB Mobil Penumpang Bus Bus Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
4.1.01.01.06	PKB Mobil Barang/Teban Pick Up	3.479.143.000	2.884.462.836	256.764.036	119.958.721	-	376.722.787	3.261.185.893	93,74%	1.826	249	2.075	
4.1.01.01.06.0001	PKB Mobil Barang/Teban Pick Up Pribadi	3.471.765.000	2.876.356.347	253.877.651	119.958.721	-	373.836.372	3.250.222.719	93,62%	1.816	246	2.062	
4.1.01.01.06.0004	PKB Mobil Barang/Teban Pick Up Pempus	-	-	1.933.447	-	-	1.933.447	-	#DIV/0!	-	2	2	
4.1.01.01.06.0004	PKB Mobil Barang/Teban Pick Up Pemerintah Daerah	7.378.000	8.076.489	962.938	-	-	962.938	9.039.427	123,52%	10	1	11	
4.1.01.01.07	PKB Mobil Barang/Teban Light truck	1.334.287.000	1.077.079.795	109.429.372	147.743.626	-	147.743.626	1.234.245.425	91,78%	271	36	307	
4.1.01.01.07.0001	PKB Mobil Barang/Teban Light Truck Pribadi	1.194.904.000	974.189.976	109.429.372	147.743.626	-	147.743.626	1.059.904.910	90,95%	243	33	276	
4.1.01.01.07.0002	PKB Mobil Barang/Teban Light Truck Umum	132.651.000	99.192.600	19.913.401	-	-	19.913.401	119.106.001	89,79%	23	3	26	
4.1.01.01.07.0003	PKB Mobil Barang/Teban Light Truck Pempus	3.555.000	2.658.500	-	-	-	2.658.500	74,78%	1	-	1		
4.1.01.01.07.0004	PKB Mobil Barang/Teban Light Truck Pemda	3.147.000	3.380.000	-	-	-	3.380.000	107,40%	3	-	3		
4.1.01.01.08	PKB Mobil Barang/Teban Truck	554.910.000	429.853.412	95.061.688	17.439.826	-	112.501.514	611.054.926	110,22%	99	22	121	
4.1.01.01.08.0001	PKB Mobil Barang/Teban Truck Pribadi	432.156.000	401.518.650	85.683.976	17.439.826	-	103.123.803	504.642.452	116,77%	82	18	99	
4.1.01.01.08.0002	PKB Mobil Barang/Teban Truck Umum	107.794.000	80.605.200	2.224.462	-	-	2.224.462	82.829.662	76,84%	11	1	13	
4.1.01.01.08.0003	PKB Mobil Barang/Teban Truck Pempus	5.243.063	5.243.063	-	-	-	5.243.063	#DIV/0!	1	-	1		
4.1.01.01.08.0004	PKB Mobil Barang/Teban Truck Pemerintah Daerah	14.960.000	11.155.200	7.153.250	-	-	7.153.250	15.339.250	102,50%	5	5	5	
4.1.01.01.09	PKB Mobil Barang/Teban Blind Van	2.394.000	1.790.250	-	-	-	-	1.790.250	0,00%	1	-	1	
4.1.01.01.09.0001	PKB Mobil Barang/Teban Blind Van Pribadi	2.394.000	1.790.250	-	-	-	-	1.790.250	74,78%	1	-	1	
4.1.01.01.09.0002	PKB Mobil Barang/Teban Blind Van Umum	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
4.1.01.01.09.0004	PKB Mobil Barang/Teban Blind Van Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
4.1.01.01.10	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Dua Di	9.370.281.000	7.848.829.044	770.480.950	167.845.663	-	938.026.613	8.786.855.657	93,75%	31.836	3.907	35.743	
4.1.01.01.10.0001	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Dua Di	9.347.227.000	7.827.268.196	766.098.723	167.845.663	-	933.644.386	8.760.912.582	93,73%	31.532	3.842	35.374	
4.1.01.01.10.0002	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Dua U	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
4.1.01.01.10.0003	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda 2 Pem	3.679.000	4.232.662	237.412	-	-	237.412	4.470.074	121,50%	57	4	61	
4.1.01.01.10.0004	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda 2 Pem	19.375.000	17.328.186	4.144.815	-	-	4.144.815	21.473.001	110,83%	247	61	308	
4.1.01.01.11	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Tiga	12.936.000	10.276.422	4.416.561	-	-	-	14.692.983	113,49%	45	20	65	
4.1.01.01.11.0001	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Tiga P	11.711.000	9.532.842	4.226.437	-	-	-	13.579.279	115,95%	34	17	51	
4.1.01.01.11.0002	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Tiga P	970.000	1.236.000	-	-	-	-	1.113.704	115,77%	2	3	5	
4.1.01.01.11.0004	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Tiga P	1.053.000	787.580	190.124	-	-	-	977.704	92,85%	9	3	12	
4.1.01.02	BEA BALK NAMA KENDARAAN BERB	22.626.229.000	20.747.430.000	2.616.910.000	-	-	-	23.374.340.000	103,31%	6.330	785	7.115	
4.1.01.02.01.0001	BENKCB Mobil Penumpang Sedan	9.636.000	12.770.000	-	-	-	-	12.770.000	132,52%	5	-	5	
4.1.01.02.02.0001	BENKCB Mobil Penumpang Jeep	1.061.102.000	966.010.000	83.808.000	-	-	83.808.000	1.049.810.000	98,94%	2	-	2	
4.1.01.02.03.0001	BENKCB Mobil Bus Mikrobus	8.414.184.000	7.613.619.000	1.086.200.000	-	-	1.086.200.000	8.699.810.000	103,39%	571	67	638	
4.1.01.02.04.0001	BENKCB Mobil Bus Mikrobus	60.425.000	49.600.000	-	-	-	-	49.600.000	82,09%	2	-	2	
4.1.01.02.05.0001	BENKCB Mobil Bus	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
4.1.01.02.06.0001	BENKCB Mobil Barang / Beban Pick Up	2.166.584.000	2.055.880.000	159.300.000	-	-	159.300.000	2.215.180.000	103,22%	233	17	250	
4.1.01.02.07.0001	BENKCB Mobil Barang / Beban Light Truck	684.031.000	561.490.000	153.500.000	-	-	153.500.000	714.990.000	104,53%	26	6	32	
4.1.01.02.08.0001	BENKCB Mobil Barang / Beban Truck	106.487.000	163.010.000	1.000.000	-	-	1.000.000	164.010.000	154,02%	8	1	9	
4.1.01.02.09.0001	BENKCB Mobil Barang/Beban Blind Van	13.401.000	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	82,08%	1	-	1	
4.1.01.02.10.0001	BENKCB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Dua	10.882.237.000	9.299.261.000	1.107.910.000	-	-	1.107.910.000	10.407.171.000	103,22%	5.537	677	6.214	
4.1.01.02.11.0001	BENKCB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Tiga	28.140.000	24.799.000	25.200.000	-	-	25.200.000	49.999.000	177,68%	15	15	30	
4.1.01.02.12.0001	BENKCB Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
4.1.01.02.13.0001	BENKCB Kendaraan Khusus Alat Berat	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
4.1.01.02.14.0001	BENKCB Mobil Roda Tiga	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
4.1.01.04	PAJAK AIR PERMUKAAN	104.078.000	100.037.400	18.451.980	-	-	-	18.451.980	118,85%	-	-	-	
4.1.01.04.01.0001	Volume Pengambilan Air (CM3)	104.078.000	104.078.000	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	
4.1.01.04.02	PAJAK POKOK GULA TAKALAR	80.402.000	76.982.400	15.396.480	-	-	-	15.396.480	92,378.880	114,90%	-	-	-
4.1.01.04.03	REtribusi LASA USAHA	23.676.000	23.055.000	3.058.500	-	-	-	3.058.500	26,110.500	110,58%	-	-	-
4.1.01.04.04	REtribusi Pemakatan Ruang	2.400.000	2.400.000	1.200.000	-	-	-	1.200.000	100,00%	-	-	-	
4.1.04.12	DENDA PAJAK	2.400.000	1.200.000	-	-	-	-	2.400.000	50,00%	-	-	-	
4.1.01.04.12.01	DENDA PAJAK KENDARAAN BERNOT	2.399.072.000	729.489.311	4.897.491	1.181.790	-	26.889.260	734.869.611	30,64%	-	-	-	
4.1.01.12.01.0001	Denda PKB Mobil Penumpang Sedan	2.659.156.000	702.450.911	3.583.290	-	-	4.765.080	707.215.991	26,60%	-	-	-	
4.1.04.12.01.0002	Denda PKB Mobil Penumpang Jeep	13.994.000	3.694.440	-	-	-	-	3.694.440	26,40%	-	-	-	
4.1.04.12.01.0003	Denda PKB Mobil Penumpang Miibus	193.029.000	12.029.180	-	-	-	-	12.029.180	6,23%	-	-	-	
4.1.04.12.01.0004	Denda PKB Mobil Bus Mikrobus	926.282.000	242.680.720	1.92									

REALISASI PENERIMAAN PADA KANTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH TAKALAR BULAN : DESEMBER 2022												
CODE REKENANSI	URAIAN	TARGET (SAMSAT Takalar)	REALISASI S/D BULAN	LOKAL	LINK	ESAMSAT	JUMLAH BLN INI	S/D BLN INI	%	BLN LALU	JUMLAH UNIT BLN INI	S/D BLN INI
<b>4.1.01.01</b>	<b>PAJAK KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>27.190.344.000</b>	<b>24.978.978.815</b>	<b>2.410.723.120</b>	<b>951.312.050</b>	<b>4.358.250</b>	<b>3.366.393.420</b>	<b>28.345.372.235</b>	<b>104,25%</b>	<b>39.830</b>	<b>4.637</b>	<b>44.467</b>
4.1.01.01.01	PKB Mobil Penumpang Sedan	274.734.000	233.477.360	23.247.640	21.740.270	-	44.987.910	278.465.270	101,36%	105	16	121
4.1.01.01.01.0001	PKB Mobil Penumpang Sedan Pribadi	272.954.000	232.180.730	23.247.640	21.740.270	-	44.987.910	277.168.640	101,54%	94	16	110
4.1.01.01.01.0002	PKB Mobil Penumpang Sedan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.01.01.01.0004	PKB Mobil Penumpang Sedan Pemerintah Daerah	1.780.000	1.296.630	-	-	-	-	1.296.630	#DIV/0!	-	-	-
<b>4.1.01.01.02</b>	<b>PKB Mobil Penumpang Jeep</b>	<b>1.120.047.000</b>	<b>1.055.945.640</b>	<b>87.529.750</b>	<b>73.568.750</b>	<b>-</b>	<b>161.098.500</b>	<b>1.217.044.140</b>	<b>108,66%</b>	<b>279</b>	<b>32</b>	<b>311</b>
4.1.01.01.02.0001	PKB Mobil Penumpang Jeep Pribadi	1.096.788.000	1.036.252.890	83.398.000	73.568.750	-	156.966.750	1.193.219.640	108,79%	273	30	303
4.1.01.01.02.0002	PKB Mobil Penumpang Jeep Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.01.01.02.0003	PKB Mobil Penumpang Jeep Pemerintah Pusat	-	2.751.000	2.136.750	-	-	-	4.887.750	#DIV/0!	1	1	2
4.1.01.01.02.0004	PKB Mobil Penumpang Jeep Pemerintah Daerah	-	16.941.750	1.995.000	-	-	-	18.936.750	81,42%	5	1	6
<b>4.1.01.01.03</b>	<b>PKB Mobil Penumpang Minibus</b>	<b>12.490.556.000</b>	<b>11.450.339.290</b>	<b>1.177.661.000</b>	<b>574.427.250</b>	<b>3.480.750</b>	<b>1.755.569.000</b>	<b>13.205.908.290</b>	<b>105,73%</b>	<b>5.221</b>	<b>758</b>	<b>5.979</b>
4.1.01.01.03.0001	PKB Mobil Penumpang Minibus Pribadi	12.352.779.000	11.356.863.040	1.159.484.500	574.427.250	3.480.750	1.737.392.500	13.094.255.540	105,75%	5.133	738	5.871
4.1.01.01.03.0003	PKB Mobil Penumpang Minibus Umum	12.311.000	11.046.000	1.046.000	-	-	-	15.393.000	125,03%	14	3	17
4.1.01.01.03.0004	PKB Mobil Penumpang Minibus Pemerintah Pusat	-	6.573.000	5.974.500	-	-	-	9.502.500	-	5	4	9
4.1.01.01.03.0004	PKB Mobil Penumpang Minibus Pemerintah Daerah	-	88.893.000	76.455.750	10.301.500	-	-	10.301.500	97,60%	69	13	82
<b>4.1.01.01.04</b>	<b>PKB Mobil Penumpang Microbus</b>	<b>14.972.000</b>	<b>10.905.450</b>	<b>1.953.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.953.000</b>	<b>12.858.450</b>	<b>85,88%</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
4.1.01.01.04.0001	PKB Mobil Penumpang Microbus Pribadi	-	14.972.000	10.905.450	-	-	-	10.905.450	72,84%	-	-	-
4.1.01.01.04.0002	PKB Mobil Penumpang Microbus Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.01.01.04.0004	PKB Mobil Penumpang Microbus Pemerintah Daerah	-	-	1.953.000	-	-	1.953.000	1.953.000	#DIV/0!	-	1	1
<b>4.1.01.01.05</b>	<b>PKB Mobil Penumpang Bus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.1.01.01.05.0001	PKB Mobil Penumpang Bus Pribadi	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
4.1.01.01.05.0002	PKB Mobil Penumpang Bus Umum	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
4.1.01.01.05.0004	PKB Mobil Penumpang Bus Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
<b>4.1.01.01.06</b>	<b>PKB Mobil Barang/Beban Light Truck</b>	<b>3.045.243.000</b>	<b>2.848.418.125</b>	<b>232.972.230</b>	<b>88.863.280</b>	<b>-</b>	<b>321.835.510</b>	<b>3.170.253.635</b>	<b>104,11%</b>	<b>1.869</b>	<b>207</b>	<b>2.076</b>
4.1.01.01.06.0001	PKB Mobil Barang/Beban Light Truck Pribadi	3.040.305.000	2.843.611.555	232.266.980	88.863.280	-	321.130.260	3.164.741.815	104,09%	1.862	206	2.068
4.1.01.01.06.0003	PKB Mobil Barang/Beban Light Truck Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.01.01.06.0004	PKB Mobil Barang/Beban Light Truck Pemerintah Daerah	-	4.938.000	4.906.570	-	-	-	4.906.570	97,34%	7	-	1
<b>4.1.01.01.07</b>	<b>PKB Mobil Barang/Beban Pick Up</b>	<b>983.877.800</b>	<b>883.877.800</b>	<b>112.001.500</b>	<b>26.890.500</b>	<b>-</b>	<b>138.892.000</b>	<b>1.022.469.500</b>	<b>103,93%</b>	<b>243</b>	<b>28</b>	<b>271</b>
4.1.01.01.07.0001	PKB Mobil Barang/Beban Light Truck Pribadi	860.469.000	786.669.000	101.985.000	26.890.500	-	128.875.500	915.544.500	106,40%	221	23	244
4.1.01.01.07.0002	PKB Mobil Barang/Beban Light Truck Umum	114.797.000	90.675.000	3.529.500	-	-	3.529.500	94.204.500	82,06%	18	1	19
4.1.01.01.07.0003	PKB Mobil Barang/Beban Light Truck Pemerintah Pusat	-	1.436.500	4.134.000	-	-	4.134.000	5.570.500	282,48%	1	2	3
4.1.01.01.07.0004	PKB Mobil Barang/Beban Light Truck Pemerintah Daerah	-	6.586.000	2.343.000	-	-	-	2.343.000	35,58%	3	2	5
<b>4.1.01.01.08</b>	<b>PKB Mobil Barang/Beban Truck</b>	<b>475.920.000</b>	<b>422.870.500</b>	<b>32.011.500</b>	<b>17.803.500</b>	<b>-</b>	<b>49.815.000</b>	<b>472.685.500</b>	<b>99,32%</b>	<b>97</b>	<b>11</b>	<b>108</b>
4.1.01.01.08.0001	PKB Mobil Barang/Beban Truck Pribadi	421.761.000	378.631.500	23.646.000	17.803.500	-	41.449.500	420.081.000	99,60%	84	6	90
4.1.01.01.08.0002	PKB Mobil Barang/Beban Truck Umum	46.663.000	38.161.500	2.281.500	-	-	2.281.500	40.443.000	86,67%	8	1	9
4.1.01.01.08.0003	PKB Mobil Barang/Beban Truck Pemerintah Pusat	-	964.000	702.000	-	-	1.553.500	2.255.500	232,97%	1	1	2
4.1.01.01.08.0004	PKB Mobil Barang/Beban Truck Pemerintah Daerah	6.532.000	5.375.500	4.530.500	-	-	4.530.500	9.906.000	151,65%	4	3	7
<b>4.1.01.01.09</b>	<b>PKB Mobil Barang/Beban Blind Van</b>	<b>1.790.250</b>	<b>1.790.250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.790.250</b>	<b>1.790.250</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
4.1.01.01.09.0001	PKB Mobil Barang/Beban Blind Van Pribadi	2.458.000	1.790.250	-	-	-	-	1.790.250	72,83%	-	-	-
4.1.01.01.09.0002	PKB Mobil Barang/Beban Blind Van Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.01.01.09.0004	PKB Mobil Barang/Beban Blind Van Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
<b>4.1.01.01.10</b>	<b>PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Dua</b>	<b>8.768.335.000</b>	<b>8.058.915.700</b>	<b>740.807.500</b>	<b>148.018.500</b>	<b>877.500</b>	<b>889.403.500</b>	<b>8.948.319.200</b>	<b>102,05%</b>	<b>31.660</b>	<b>3.872</b>	<b>35.532</b>
4.1.01.01.10.0001	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Dua Pribadi	8.748.635.000	8.039.485.200	736.062.000	148.018.500	877.500	884.958.000	8.924.443.200	102,01%	31.693	3.517	35.210
4.1.01.01.10.0002	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Dua Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.01.01.10.0003	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Dua Pemerintah Pusat	2.964.000	3.299.000	599.000	-	-	599.000	3.898.000	131,51%	47	8	55
4.1.01.01.10.0004	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Dua Pemerintah Daerah	16.736.000	16.131.500	3.846.500	-	-	3.846.500	19.978.000	119,37%	220	47	267
<b>4.1.01.01.11</b>	<b>PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Tiga</b>	<b>14.255.000</b>	<b>12.739.000</b>	<b>2.839.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.839.000</b>	<b>15.578.000</b>	<b>109,28%</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>63</b>
4.1.01.01.11.0001	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Tiga Pribadi	13.606.000	11.769.000	2.700.000	-	-	2.700.000	14.469.000	106,34%	39	10	49
4.1.01.01.11.0002	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Tiga Umum	-	136.000	-	-	-	-	136.000	#DIV/0!	2	-	2
4.1.01.01.11.0004	PKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Tiga Pemerintah Daerah	649.000	534.000	139.000	-	-	139.000	973.000	149,92%	10	2	12
<b>4.1.01.02.01</b>	<b>BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERKIM</b>	<b>21.479.478.000</b>	<b>20.494.683.000</b>	<b>2.239.450.000</b>	<b>2.239.450.000</b>	<b>-</b>	<b>2.239.450.000</b>	<b>22.734.133.000</b>	<b>105,84%</b>	<b>7.907</b>	<b>792</b>	<b>8.699</b>
4.1.01.02.01.0001	BBNKB Mobil Penumpang Sedan	208.513.000	159.380.000	17.600.000	-	-	17.600.000	176.980.000	84,88%	12	1	13
4.1.01.02.02.0001	BBNKB Mobil Penumpang Jeep	1.053.327.000	1.077.370.000	123.300.000	-	-	123.300.000	1.200.670.000	113,99%	685	4	43
4.1.01.02.03.0001	BBNKB Mobil Penumpang Minibus	7.126.685.000	6.834.050.000	669.800.000	-	-	669.800.000	7.503.850.000	105,29%	60	45	730
4.1.01.02.04.0001	BBNKB Mobil Bus Microbus	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
4.1.01.02.05.0001	BBNKB Mobil Bus Bus	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
4.1.01.02.06.0001	BBNKB Mobil Barang/Beban Pick Up	2.364.790.000	2.330.990.000	143.600.000	-	-	143.600.000	2.474.590.000	104,64%	301	12	313
4.1.01.02.07.0001	BBNKB Mobil Barang/Beban Light Truck	400.056.000	324.440.000	-	-	-	-	324.440.000	81,10%	24	-	24
4.1.01.02.08.0001	BBNKB Mobil Barang/Beban Truck	113.180.000	230.240.000	68.600.000	-	-	68.600.000	298.840.000	264,04%	22	3	25
4.1.01.02.09.0001	BBNKB Mobil Barang/Beban Blind Van	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
4.1.01.02.10.0001	BBNKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Dua	10.156.141.000	9.483.613.000	1.198.550.000	-	-	1.198.550.000	10.682.163.000	105,18%	6.792	718	7.510
4.1.01.02.11.0001	BBNKB Sepeda Motor Sepeda Motor Roda Tiga	56.786.000	54.730.000	18.000.000	-	-	18.000.000	72.730.000	128,08%	31	10	41
4.1.01.02.12.0001	BBNKB Kendaraan Bermotor Yang Diperlakukan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.01.02.13.0001	BBNKB Kendaraan Khusus Alat Berat	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
4.1.01.02.14.0001	BBNKB Mobil Roda Tiga	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
<b>4.1.01.04</b>	<b>PAJAK AIR PERMUKAAN</b>	<b>119.793.803</b>	<b>129.858.980</b>	<b>14.345.080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.345.080</b>	<b>144.204.060</b>	<b>120,38%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.01.04.01.0001	Volume Pengambilan Air (M3)	119.793.803	129.858.980	14.345.080	-	-	14.345.080	144.204.060	120,38%	-	-	-
	PDAM	100.295.106	106.977.980	10.672.580	-	-	10.672.580	119.740.560	119,39%	-	-	-
	PT PERKEBUNAN GULA TAKALAR	19.498.697	22.881.000	1.582.500	-	-	1.582.500	24.463.500	125,46%	-	-	-
<b>4.1.02.02</b>	<b>RETRIBUSI PATAH SAJAH</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.524.000</b>	<b>105,17%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Retribusi Pemakaian Ruangan	2.400.000	1.484.000	1.040.000	-	-	1.040.000	2.524.000	105,17%	-	-	-
	Kantori Samsat Takalar	2.400.000	1.484.000	1.040.000	-	-	1.040.000	2.524.000	105,17%	-	-	-
<b>4.1.04.12</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>4.098.058.000</b>	<b>1.351.301.036</b>									



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ashari Zainal  
Nim : 105751100120  
Program Studi : D-III Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	12 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Agustus 2023  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S. Hum  
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail: [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

## Bab I Ashari Zainal 105751100120

### ORIGINALITY REPORT

**12%**

SIMILARITY INDEX

**10%**

INTERNET SOURCES

**10%**

PUBLICATIONS

**10%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[www2.slideshare.net](http://www2.slideshare.net)

Internet Source

3%

2

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

3%

3

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

2%

4

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

2%

5

[digilib.iainlangsa.ac.id](http://digilib.iainlangsa.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  On

Exclude bibliography  On



=

## Bab II Ashari Zainal 105751100120

### ORIGINALITY REPORT

**24%**  
SIMILARITY INDEX

**25%**  
INTERNET SOURCES

**9%**  
PUBLICATIONS

**9%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	17%
2	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://repository.unib.ac.id">repository.unib.ac.id</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%





### Bab III Ashari Zainal 105751100120

ORIGINALITY REPORT

**10%**  
SIMILARITY INDEX

**10%**  
INTERNET SOURCES

**2%**  
PUBLICATIONS

**2%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

**1** [digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)  
Internet Source

**10%**



Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  On



# Bab IV Ashari Zainal 105751100120

## ORIGINALITY REPORT

**0%**  
SIMILARITY INDEX

**0%**  
INTERNET SOURCES

**0%**  
PUBLICATIONS

**0%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES



Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

turnitin  
Exclude matches 2%



## BIOGRAFI PENULIS



**Nama lengkap penulis Ashari Zainal**, lahir pada tanggal 10 Oktober 2001 di Dusun Romang Sapiria Desa Parasangang Beru kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan buah hati dari Bapak Zainal Dg.Nyonri dan Ibu Hj.Hasbiah Dg.Ugi. Sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Penulis memulai jenjang pendidikan di SDN 71 Mario yang lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Galesong Selatan dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Takalar kemudian lulus pada tahun 2019. Setelah tamat SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

Penulis sangat bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT kesempatan, kesabaran, dan umur panjang sehingga dapat melewati masa-masa tersulit di hidup. Harapan penulis semoga ilmu yang telah didapatkan selama ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat luas dan tujuan penulis yang paling penting dari perjalanan selama ini adalah untuk membahagiakan orangtua serta orang-orang tersayang.